



Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Era Kepemimpinan Prabowo-Gibran dalam Perspektif Amartya Sen

Yosef Keladu¹, Dominikus Zinyo Darling^{*2}, Felix Riondi Sugar³, Angelus Pasli Armansi⁴

¹²³⁴ Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere, 86152, Indonesia

*Corresponding Author: sinyodarling@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 17 May 2025

Revised 10 December 2025

Accepted 14 January 2026

Available online 30 January 2026

E-ISSN: 0216-9290

How to cite:

Keladu, Y., Darling, D. Z., Sugar, F. R., Armansi, A. P. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Amartya Sen. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 18 (1), 1-8.

ABSTRAC

This article aims to examine the Prabowo-Gibran flagship program, free nutritious meals, using Amartya Sen's theory of capability and justice. The method used is qualitative with a library research approach, where data are collected through literature studies and then analyzed using thematic interpretation method approach. The findings show that although the free meal policy has noble goals, in practice there is a risk of reducing human welfare only to the matter of distribution food, without considering the aspect of choice, free-decision, and individual indendence. Furthermore, the free meal policy has the potential to strengthen people's dependence and at the same time ignore the strengthening of socio-economic structures that should support long-term capabilities. Therefore, using the lense of Amarta Sen's thinking, this article proposes that government program, including the free meal program, should focus not only on the availability of good, but also on expanding the freedom for people live a valuable or good life. A program should emphazise an approach from mere provision to a sustainable empowerment. On this basis, the article proposes several policy recommendations that ought to be prioritized by the government, as these alternatives are considered more effective in broadening societal capabilities.

Keywords: Amartya Sen, Capability, Freedom, Free Nutritious Meals Program, Prabowo- Gibran.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, makan bergizi gratis (MBG) dengan menggunakan teori kapabilitas dan keadilan Amartya Sen. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), di mana data-data dikumpulkan lewat studi kepustakaan dan kemudian dianalisis dengan metode interpretasi tematis. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan makan gratis memiliki tujuan mulia, dalam praktiknya terdapat risiko pereduksian kesejahteraan manusia hanya pada soal distribusi makanan, tanpa memperhatikan aspek pilihan, putusan, serta kemandirian individu. Lebih lanjut, program makan bergizi gratis berpotensi memperkuat ketergantungan masyarakat dan sekaligus mengabaikan penguatan struktur sosial-ekonomi yang seharusnya menopang kapabilitas jangka panjang. Karena itu, dengan menggunakan lensa pemikiran Amartya Sen, artikel ini menganjurkan agar program pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis hendaknya berfokus bukan saja pada ketersediaan barang, tetapi juga pada perluasan kebebasan bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Sebuah kebijakan termasuk makan bergizi gratis hendaknya menekankan pendekatan dari sekadar pemberian ke arah pemberdayaan yang berkelanjutan. Untuk itu, dengan berpijak pada pemikiran Sen, artikel ini juga memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang sedianya harus diprioritaskan oleh pemerintah, sebab alternatif itu dinilai lebih memperluas kapabilitas masyarakat.

Kata kunci: Amartya Sen, Kapabilitas, Kebebasan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Prabowo-Gibran



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.32734/politeia.v18i1.20855>

1. Pendahuluan

Program makan bergizi gratis (MBG) yang diusung oleh pasangan Prabowo-Gibran dalam kampanye Pemilu 2024 dan yang telah direalisasikan akhir-akhir ini, telah menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan dalam ruang publik Indonesia. Program ini awalnya diperkenalkan sebagai "makan siang gratis", lalu kemudian diubah menjadi "makan bergizi gratis." Program MBG dirancang untuk memberikan intervensi langsung terhadap persoalan kesehatan dan pendidikan anak-anak Indonesia. Program ini akan menyoal anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui intervensi gizi (Sanjaya, 2025). Di samping meningkatkan kualitas SDM, intervensi gizi juga bertujuan menghilangkan stunting dan kemiskinan ekstrem (Purwawidhu, 2025). Pemerintah mengklaim bahwa program ini akan menjadi strategi akseleratif untuk menurunkan angka stunting nasional yang masih berada di kisaran 21,5% pada tahun 2023, jauh dari target 14% yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Secara teoretis, program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran ini mungkin baik demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan, tetapi dalam praktik ada banyak persoalan yang ditemukan. *Indonesian Corruption Watch* (2025) mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap keterlibatan sektor swasta dalam proyek-proyek negara agar tidak mengarah pada praktik kartel atau monopoli kebijakan publik demi keuntungan segelintir elit ekonomi dan politik. Lebih lanjut, menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Trisno Aji (2025), ditemukan bahwa program MBG tidak memiliki arah yang jelas dan dapat menimbulkan dilema implementasi. Hal ini berhubungan dengan term makan gratis yang digunakan oleh pemerintah dengan kenyataan mahalannya anggaran yang harus ditanggung oleh masyarakat, melalui pajak untuk menunjang program ini. Sementara itu, belajar dari pengalaman negara lain, program pemberian makanan di sekolah memang dapat meningkatkan kehadiran dan konsentrasi siswa, namun hasilnya sangat tergantung pada kualitas implementasi, keberlanjutan anggaran, dan konteks lokal (Alderman & Bundy, 2012). Atau, belajar dari beberapa negara di Afrika, program ini meningkatkan ketergantungan pada skema bantuan konsumtif tanpa pelibatan komunitas dan keberlanjutan anggaran. Hal ini justru melemahkan kemandirian lokal (Wang et al., 2021).

Berbeda dengan beberapa penelitian di atas, yang memberikan penekanan pada aspek praktis pada level implementasi, penelitian ini mengkaji bahaya pereduksian kesejahteraan hanya pada distribusi makanan karena tidak memberikan perhatian utama pada pilihan dan kemandirian individu. Disinyalir, usaha pemerintah Indonesia melakukan peningkatan gizi masyarakat melalui intervensi makanan secara langsung berpotensi melemahkan pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat akan tergantung pada bantuan makanan yang disediakan oleh pemerintah tanpa usaha memberdayakan ekonominya sendiri. Itu berarti, program MBG tidak menyentuh hal dasarnya dalam pembangunan masyarakat berkelanjutan, yakni pemberdayaan melalui peningkatan kapabilitas. Karena itu, dengan menggunakan lensa pemikiran Amartya Sen, penelitian ini menganjurkan agar setiap program pemerintah, termasuk program MBG, hendaknya memberikan penekanan pada peningkatan kapabilitas masyarakat sebagai penerima atau sasaran program.

Amartya Sen, pemenang hadiah nobel di bidang ekonomi, mengatakan bahwa pembangunan tidak cukup diukur dari distribusi barang atau layanan, tetapi dari sejauh mana individu memiliki kapabilitas, yakni kebebasan riil, untuk menjalani hidup yang mereka nilai bermakna (Sen, 2009: 253-268). Jika ditelaah dari perspektif ini, MBG berpotensi gagal memperluas kapabilitas jika hanya berfungsi sebagai transfer makanan tanpa pemberdayaan. Anak-anak hanya menjadi penerima pasif, tanpa memperoleh pemahaman tentang gizi, keterampilan memilih makanan sehat, atau akses terhadap sumber pangan berkelanjutan. Bahkan, jika program ini bersifat sentralistik dan tidak memperhatikan variasi lokal, kualitas makanan pun bisa menjadi problematik, sebagaimana kritik terhadap program serupa di India yang kerap mengalami masalah korupsi, keterlambatan distribusi, dan rendahnya kualitas makanan (Afriadi, 2010). Lebih lanjut, Sen menekankan pentingnya *public reasoning* dalam kebijakan publik. Artinya, masyarakat harus dilibatkan dalam perumusan dan evaluasi kebijakan agar kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan nilai warga.

Untuk mengetahui aspek pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang digagaskan oleh Amartya Sen dalam kaitannya dengan program MBG, penelitian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis berikut ini: Apakah masyarakat dilibatkan dalam merancang menu makanan? Apakah sekolah dan komunitas lokal punya andil dalam penyediaan dan distribusi?

2. Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Metode ini digunakan untuk menjelaskan berbagai literatur yang relevan dengan tema tulisan, memberikan landasan teoretis, memahami penelitian sebelumnya, dan sekaligus untuk menemukan gap dari penelitian-penelitian sejenis yang sudah dilakukan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, di mana penulis mengumpulkan

data-data kualitatif terkait, teori kapabilitas Amartya Sen, kebijakan makan bergizi gratis, serta studi tentang hak pangan dan pembangunan manusia dari literature-literature seperti buku, artikel jurnal ataupun tulisan ilmiah lainnya di berbagai media online. Data-data yang dikumpulkan dipilah-pilah demi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi tematis, dalam arti data-data yang dikumpulkan diidentifikasi, dianalisis, diorganisasi dan diinterpretasi sesuai dengan tema dan tujuan penelitian. Analisis tematis dipakai bukan hanya untuk menyajikan data tetapi untuk mengungkapkan relasi makna antara program makan bergizi gratis dan teori kapabilitas yang dicetuskan oleh Amartya Sen.

3. Hasil dan Pembahasan

Perspektif Amartya Sen: Teori Kapabilitas dan Keadilan

Amartya Kumart Sen adalah seorang ekonom dan filsuf asal India yang dikenal luas atas kontribusinya terhadap pemikiran mengenai pembangunan manusia, keadilan sosial, dan kemiskinan. Ia pernah meraih penghargaan Nobel dalam bidang ekonomi pada tahun 1998 karena karya-karyanya yang revolusioner dalam teori kesejahteraan ekonomi dan pendekatan kapabilitas. Salah satu sumbangan pemikirannya yang paling berpengaruh adalah *the capability approach* atau pendekatan kapabilitas, yang hingga kini banyak dijadikan dasar dalam studi pembangunan manusia dan kebijakan sosial. Adapun, teori kapabilitas yang dikembangkan oleh Sen menawarkan pendekatan baru dalam menilai kesejahteraan manusia. Alih-alih berfokus semata pada pendapatan atau kekayaan sebagai indikator utama kemajuan, Sen menekankan pentingnya kapabilitas, yakni kemampuan nyata seseorang untuk menjalani kehidupan yang ia nilai berharga (Sen, 2009: 253-268). Dalam pandangan ini, ukuran kesejahteraan bukan semata soal apa yang dimiliki seseorang (*means*), tetapi apa yang bisa ia lakukan atau capai dengan apa yang ia miliki (*ends*). Artinya, pembangunan tidak hanya dinilai dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana individu memiliki kebebasan untuk memilih kehidupan yang bermakna bagi dirinya.

Pemikiran ini tampak nyata dalam kajian Sen mengenai bencana kelaparan (*famine*). Ia menunjukkan bahwa banyak bencana kelaparan di dunia tidak semata terjadi karena kelangkaan pangan, tetapi karena kegagalan dalam sistem distribusi, ketimpangan kekuasaan, serta tidak adanya kebebasan politik dan sosial bagi kelompok-kelompok tertentu (Sen, 1981: 7-8). Dalam konteks ini, keadilan bukan sekadar memberi makanan kepada yang lapar, tetapi memastikan bahwa mereka memiliki *agency*, atau kemampuan untuk bertindak dan mengambil keputusan atas hidup mereka sendiri. *Agency* menjadi inti dari kehidupan yang bermartabat, karena ia menunjukkan bahwa manusia bukan sekadar penerima bantuan pasif, tetapi subjek aktif dalam proses pembangunan. Pemahaman serupa juga merupakan model yang sangat dianjurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang kemudian dipadatkan dalam konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*), dengan penekanan pada dimensi transformasi sosial (Amirya & Irianto, 2023).

Selain *capability*, Sen juga menekankan pentingnya *functionings*, yakni bentuk-bentuk “keadaan menjadi” atau “keadaan melakukan” yang mencerminkan kualitas kehidupan seseorang. Contoh dari *functionings* adalah menjadi sehat, mendapatkan pendidikan, memiliki pekerjaan yang layak, atau bisa berpartisipasi dalam kehidupan politik. Namun, tidak semua orang memiliki *capability* yang sama untuk mewujudkan *functionings* tersebut, karena perbedaan kondisi individu dan konteks sosial (Sen, 2009: 282-284). Oleh karena itu, kebijakan yang adil seharusnya memperhatikan keragaman kapabilitas setiap individu, bukan sekadar menyamaratakan distribusi sumber daya.

Dalam konteks pengambilan kebijakan sosial, pendekatan kapabilitas menawarkan kerangka yang lebih manusiawi dan kontekstual (Daven, 2020: 132-138). Misalnya, dalam merancang intervensi pengentasan masalah gizi sebagaimana diidealkan oleh Prabowo melalui Program MBG, pendekatan ini mendorong para pembuat kebijakan untuk tidak hanya memikirkan bantuan ekonomi langsung, tetapi juga memastikan bahwa individu memiliki kesempatan untuk berkembang dan mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai hidup mereka. Dengan kata lain, pembangunan tidak semestinya memaksakan satu model kebahagiaan atau kesuksesan, melainkan membuka ruang bagi setiap orang untuk menentukan jalannya sendiri (Sen, 1990).

Dari pandangan kapabilitasnya, Amartya Sen mengajak kita untuk melihat keadilan sebagai proses dinamis yang memungkinkan individu hidup secara bermartabat dan bebas, bukan sekadar tercapainya keseimbangan distribusi barang. Keadilan, dalam perspektif ini, adalah ketika setiap orang memiliki kapabilitas yang setara untuk memilih dan menjalani kehidupan yang mereka nilai bermakna. Dalam konteks masyarakat yang beragam dan penuh ketimpangan, pendekatan ini menjadi sangat relevan, karena mampu melihat kebutuhan manusia secara lebih menyeluruh dan berpusat pada kebebasan nyata, bukan semata angka dan statistik. Dari perspektif Sen, pembangunan bukan hanya persoalan mengenai pertumbuhan angka, tetapi bagaimana menjadikan individu bebas mencapai apa yang mereka pilih dan jalani sendiri. Kebebasan dalam

arti kemampuan mencapai sesuatu yang dipilih dan diinginkan inilah yang disebutnya kapabilitas (Gumelar & Qomar, 2025).

Amartya Sen memahami kebebasan dari dua perspektif, yaitu proses dan kesempatan (Sen, 2009). Dari perspektif proses, kebebasan dipahami sebagai tidak adanya paksaan bagi individu dalam memilih atau sarana-sarana atau membuat keputusan yang dianggap baik atau bernilai bagi dirinya. Ketiadaan paksaan merupakan aspek penting dalam memahami kebebasan dari perspektif proses. Tetapi, kebebasan sejati tidak sekedar tidak adanya paksaan. Di sini Sen berbicara tentang kebebasan dari perspektif kesempatan. Itu berarti, kebebasan yang dimiliki seseorang memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya bagi individu tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan yang dianggap bernilai. Dalam konteks ini, kebebasan dimengerti sebagai kemampuan seseorang untuk mencapai sesuatu yang dianggap bernilai bagi dirinya. Kebebasan dari perspektif kesempatan inilah yang dianggap oleh Sen sebagai kebebasan substantive dan dikaitkan dengan kapabilitas (Gumelar & Qomar, 2025).

Analisis Kritis: MBG dalam Perspektif Amartya Sen

a. MBG dan Minimnya Partisipasi Masyarakat: Antara “Program” atau “Proyek”

Dalam maha-karyanya yang berjudul *The Idea of Justice*, Sen sangat menekankan bahwasanya dalam mengambil sebuah kebijakan publik, sangat penting bagi pemerintah untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini juga sebenarnya memiliki korelasi dengan pendekatan kapabilitasnya. Menurutnya, dalam masyarakat plural, salah satunya Indonesia, setiap warga negara memiliki kapabilitas yang beragam pula. Dalam kerangka berpikir Sen, partisipasi publik merupakan elemen kunci dalam proses pengambilan keputusan yang adil dan, Sen menekankan konsep *public reasoning*, di mana masyarakat seharusnya terlibat dalam merancang program yang mempengaruhi kehidupan mereka (Sen, 2009: 35-51). Di sini, kita dapat melihat pembacaan Sen yang menekankan bahwa dalam mengambil kebijakan, pemerintah harus menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, dan bukan malah direduksi sebagai obyek kebijakan. Dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek, kebijakan yang diambil akan dijamin menjadi lebih kontekstual yang pada akhirnya kebijakan itu pun tidak sia-sia (Keladu, 2023).

Sementara itu, jika membaca dinamika yang terjadi dalam konteks kebijakan MBG, hal ini rupanya tidak mendapatkan tempat. Meskipun dalam berbagai kampanye pemerintah menarasikan bahwa pelaksanaan MBG dilakukan dalam skema dari rakyat oleh rakyat (baca demokrasi), nyatanya hal ini tidak sepenuhnya terjadi. Ditemukan bahwa tata kelola MBG melibatkan aktor-aktor yang tak lepas dari jaringan elit kekuasaan: lembaga pelaksana Badan Gizi Nasional banyak diisi oleh purnawirawan TNI yang masuk dalam jajaran pimpinan, mulai dari kepala hingga deputi (Redaksi ArahJuang.com, 2025). Adapun tujuan kehadiran mereka adalah untuk melakukan standarisasi terhadap kualitas barang baku yang disediakan oleh petani dan nelayan lokal. Ditemukan bahwa kehadiran skema seperti ini sangat membentakan para petani dan nelayan lokal karena pada dasarnya, kualitas barang mereka akan kalah jauh dengan apa yang disediakan oleh investor yang didominasi oleh kaum oligarki (Pramono, 2025). Keterlibatan oligarki militer semacam ini berpotensi menciptakan hubungan patronase dan kepentingan bisnis di balik distribusi makanan, sehingga pemberdayaan komunitas lokal tereduksi menjadi operasi yang lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu daripada memperkuat kapasitas masyarakat secara langsung. Hal inilah yang kemudian membuat beberapa pihak, misalnya *TEMPO* menyebutkan MBG sebagai proyek ketimbang program (Pramono, 2025).

Adapun antara program dan proyek, terdapat dua hal utama yang menjadi perbedaan. *Pertama*, efek keberlanjutan. Proyek pada dasarnya adalah usaha singkat yang bertujuan untuk memecahkan masalah tertentu dan lingkup waktu tertentu. Proyek biasanya dibatasi oleh waktu, anggaran, dan sumber daya. Di sini, proyek dapat dilihat sebagai suatu usaha transformasi yang terbatas. Berbeda dengan itu, program bersifat keberlanjutan dan tidak memiliki tanggal akhir yang pasti. Ia dirancang untuk memberikan nilai jangka panjang dan selaras dengan cita-cita tertentu (Pramono, 2025). Di sini, penulis melihat bahwa program lebih diutamakan pada usaha membangun manusia secara langsung, sementara proyek lebih mengarah pada pembangunan fasilitas untuk menyelesaikan sebuah masalah atau persoalan tertentu.

Kedua, keterlibatan masyarakat. Proyek lebih menempatkan masyarakat sebagai penerima pasif atau obyek dari proyek itu sendiri. Sementara itu, program lebih kepada usaha partisipatif yang melibatkan seluruh masyarakat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga akhirnya merasakan dampaknya yang berkelanjutan. Dari sini, penulis dapat membenarkan pernyataan *TEMPO* bahwa MBG adalah proyek ketimbang program karena proses distribusi dan arah MBG sebenarnya merupakan arah jangka pendek tidak terlalu membawa dampak keberlanjutan. Dari data yang digambarkan di atas, nampak jelas bahwa program unggulan pemerintah Prabowo-Gibran, MBG tidak melibatkan masyarakat, terutama pihak penerima yaitu anak-anak sekolah dan juga ibu-ibu hamil. Hal itu disebabkan karena MBG dirancang semata-mata sebagai sebuah proyek ‘top-down’ dan bukannya sebuah program ‘bottom-up’.

b. MBG: Apakah Menunjang Perluasan Kapabilitas?

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Program MBG (Makan Bergizi Gratis) merupakan program yang hadir sebagai upaya pemerintah untuk menjamin akses terhadap makanan bergizi bagi masyarakat kurang mampu. Di permukaan, program ini tampak menjanjikan sebagai solusi atas permasalahan gizi buruk dan kelaparan di kalangan masyarakat miskin. Namun, jika dianalisis melalui pendekatan kapabilitas yang dikemukakan oleh Amartya Sen, efektivitas MBG dalam memperluas kapabilitas masyarakat masih patut dipertanyakan. Dalam teori kapabilitasnya, Sen menjelaskan bahwa salah satu persoalan dalam masyarakat yaitu persoalan kekurangan gizi bukanlah pertama-tama diakibatkan oleh kekurangan makanan, tetapi lebih disebabkan oleh ketidakadilan dalam hal akses pada makanan bergizi itu sendiri (Daven, 2020: 135). Di sini, Sen membawa suatu hal penting yakni problem keterbatasan aksesibilitas.

Menurut dosen Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Dr. Mathias Daven, keterbatasan aksesibilitas yang dimaksudkan oleh Sen dapat merujuk pada hambatan struktural yang dihadapi oleh masyarakat dalam menjalankan haknya sebagai warga negara, khususnya negara demokrasi (Daven, 2020: 132-138). Hak yang dimaksudkan di sini tentu sangat luas, mulai dari hak sosial, politik, ekonomi, hak untuk pendidikan, dan lain-lain. Untuk menunjang pemberdayaan kapabilitas, pemerintah harus menjamin akses terhadap semua hak-hak di atas. Artinya, usaha memperluas kapabilitas adalah usaha holistik yang menunjang kebutuhan masyarakat saat ini, serentak usaha terstruktur yang membangun akses bagi mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan itu di masa depan tanpa bergantung pada bantuan yang terjadi saat ini. Upaya perluasan kapabilitas tidak bisa direduksi pada usaha kecil yang hanya menjawab kebutuhan kecil, yang sebenarnya tidak terlalu menyentuh akar persoalan utama dalam masyarakat.

Sementara itu, dalam konteks MBG, pemberian makanan secara cuma-cuma tanpa disertai program pemberdayaan yang memadai justru dapat menciptakan masalah besar. Dengan skema seperti itu, masyarakat yang terbiasa mendapatkan bantuan langsung cenderung sulit untuk mandiri secara ekonomi, karena tidak ada insentif nyata untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas. MBG lebih cenderung menjadi kebijakan simbolik yang lebih menekankan pada distribusi *output* daripada transformasi struktur ketimpangan. Ia dapat menyelesaikan permasalahan kekurangan gizi secara sementara, namun tidak menjawab akar permasalahan: mengapa sebagian besar masyarakat tidak mampu mengakses pangan bergizi secara mandiri. Dalam jangka panjang, kebijakan seperti ini berpotensi memperluas ketergantungan dan mengalihkan fokus dari kewajiban negara untuk menciptakan sistem pangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, sebagaimana dicita-citakan oleh pemerintah Indonesia dan global dalam konsep *sustainable development goals* atau SDGs (Putra & Suflani, 2022).

Dari perspektif Sen, penulis membaca bahwa hal ini sama halnya dengan menutup akses pemberdayaan masyarakat pada pemenuhan hak ekonomi berkelanjutan, ekonomi yang berbasis masyarakat. Amartya Sen dalam *The Idea of Justice* menekankan bahwa pembangunan manusia tidak cukup hanya dengan pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan harus mencakup peningkatan kapabilitas yang memungkinkan mereka berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Sen, 2009: 258-260). Sigiq Gumelar dan Subaida Qomar (2025) mengklaim, pembangunan di Indonesia cenderung terfokus pada pembangunan fisik dengan tujuan utama pada pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan pembangunan berbasis kebebasan. Atau, kebijakan pembangunan yang terlalu menekankan aspek pertumbuhan ekonomi akan dengan sendirinya mengorbankan kebebasan dan kemampuan masyarakat (Iswahyudi & Asnawi, 2024). Apa yang dilakukan oleh pemerintah lewat pembangunan sosial bertentangan dengan pemikiran Amartya Sen yang menekankan bahwa pembangunan hendaknya bertujuan memperluas kebebasan dan kapabilitas masyarakat dan bukannya pada pertumbuhan ekonomi semata.

Hal serupa juga ditegaskan oleh Sri Henny Indarti (2017). Menurutnya, indikator utama pembangunan bukanlah pada peningkatan income atau pendapatan tetapi lebih pada perluasan kebebasan sebagai faktor substansial (Indarti, 2017). Itu berarti, pembangunan hendaknya membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memilih sendiri sarana-sarana yang cocok dan menentukan sendiri apa yang bernilai bagi dirinya. Dalam terang pemikiran ini, pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang membuka jalan atau kesempatan bagi masyarakat untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang secara otonom.

Dalam terang perluasan kapabilitas atau kebebasan, nampaknya lewat program MBG pemerintah sama sekali tidak memperhatikan keinginan, pilihan, atau kemampuan, entah dari anak didik penerima program ataupun dari sekolah dan masyarakat setempat. Terkait menu yang disajikan, tidak ada pilihan bagi anak didik. Semua sudah dipatok sesuai dengan standar harga yang ditetapkan badan gizi nasional. Terkait, pengelolaan, sekolah dan masyarakat tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengelola makanan bergizi bagi anak-anak didiknya. Semua dikelola oleh elit-elit ekonomi dan politik. Dari perspektif perluasan kebebasan Sen, pengabaian peran anak didik, sekolah dan masyarakat seperti di atas, mengindikasikan adanya pengurangan

kebebasan masyarakat untuk menikmati hidup yang laya dan sehat. Masyarakat sesungguhnya punya hak untuk menentukan sendiri makanan apa yang sehat untuk dirinya atau untuk anak-anak didiknya.

Lebih lanjut, kebijakan MBG dinilai kontraproduktif terhadap prinsip keadilan substansif karena memperlakukan masyarakat miskin sebagai penerima pasif, bukan sebagai agen aktif dalam menentukan hidup mereka. Ironisnya, saat ini pemerintah tetap merasa “cukup adil” hanya karena telah memberikan makanan gratis kepada masyarakatnya, padahal ketidakadilan struktural tetap tidak diinginkan. Pemerintahan beragumen bahwa adalah adil memberikan makanan bergisi kepada semua anak didik. Negara sudah bertindak adil kalau sebagian besar anak didik di Indonesia sudah mendapatkan jatah makanan bergisi. Tetapi, kalau dipertimbangkan dari perspektif kapabilitas, program MBG ini merupakan sebuah kebijakan yang sia-sia atau mubazir karena hanya mempertimbangkan kesamaan perlakuan dan mengabaikan kemampuan atau kapabilitas dari masing-masing penerima program (Keladu, 2023: 75).

Alternatif dan Rekomendasi: Sebuah Pertimbangan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah memang tampak sebagai langkah cepat dalam merespons persoalan gizi dan ketahanan pangan, terutama di kalangan anak sekolah. Namun, ketika ditinjau dari perspektif pembangunan jangka panjang, MBG menyisakan banyak catatan kritis. Salah satu kekhawatiran utama adalah sifatnya yang konsumtif dan *top-down*, yang justru berpotensi menciptakan ketergantungan baru di masyarakat tanpa menyentuh akar persoalan ketahanan pangan, pendidikan, dan ekonomi lokal. Karena itu, sudah saatnya pemerintah mulai mengalihkan fokus dari program semacam MBG menuju pendekatan pembangunan kapabilitas masyarakat secara sistemik dan berkelanjutan.

Pertama, alokasi anggaran negara sebaiknya diarahkan untuk memperkuat sistem pendidikan nasional. Pendidikan adalah pilar utama dalam membangun manusia Indonesia yang produktif, sehat, dan berdaya saing. Riset Bank Dunia menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah memiliki korelasi langsung dengan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, melalui pendidikan yang bermutu, peserta didik bisa dibekali dengan pengetahuan tentang gizi, kesehatan, dan pola hidup berkelanjutan, yang dalam jangka panjang jauh lebih berdampak daripada pemberian makanan gratis secara rutin. Peningkatan kompetensi guru, pembangunan infrastruktur sekolah yang layak, serta integrasi pendidikan vokasi berbasis kebutuhan lokal adalah investasi jangka panjang yang akan menciptakan generasi emas pada 2045 yang cerdas dan berdaya secara intelektual. Prinsip ini sangat sejalan dengan pandangan Sen yang menekankan bahwa hal utama yang harus diperhatikan oleh negara dalam hal pembangunan adalah usaha mempercepat perkembangan potensi manusia (Sen, 1984: 497).

Kedua, perluasan partisipasi politik masyarakat menjadi hal yang tidak bisa dikesampingkan. Demokrasi yang sehat bukan hanya soal pemilu lima tahunan, melainkan juga partisipasi aktif warga dalam merumuskan, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan publik (Sen, 2009: 106-113). Pemberdayaan politik masyarakat melalui pendidikan kewarganegaraan, transparansi anggaran daerah, dan pembentukan forum musyawarah berbasis komunitas akan memperkuat rasa kepemilikan warga atas program pembangunan. Pendekatan partisipatif ini jauh lebih efektif dibandingkan program sentralistik seperti MBG yang minim ruang evaluasi publik dari bawah. Ketika masyarakat memiliki ruang untuk bersuara, maka program yang lahir akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai lokal yang mereka anut (Keladu, 2010: 133-146).

Ketiga, program sosial untuk pemberdayaan ekonomi jangka panjang harus menjadi prioritas utama. Ketimbang membelanjakan anggaran negara untuk pengadaan makanan jadi yang hanya bersifat sesaat, lebih bijak jika dana tersebut dialihkan untuk memperkuat industri lokal berbasis masyarakat. Pemerintah dapat menyediakan skema pembiayaan mikro, pelatihan teknis, dan akses pasar bagi koperasi petani, UMKM pangan, serta produsen lokal lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asnuryati dari Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, ditemukan fakta bahwa penguatan ekonomi lokal tidak hanya berdampak pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap krisis global (Asnuryati, 2023). Hal ini akan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk tumbuh sebagai pelaku utama dalam pembangunan, bukan sekadar penerima bantuan.

Keempat, penyediaan dukungan terhadap akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Kesehatan adalah fondasi dari segala aktivitas sosial dan ekonomi. Tanpa tubuh yang sehat, proses belajar terganggu, produktivitas menurun, dan kualitas hidup menjadi rendah. Penelitian dari WHO menunjukkan bahwa akses terhadap layanan primer seperti puskesmas, sanitasi, air bersih, dan imunisasi dasar berperan besar dalam menurunkan angka stunting dan malnutrisi (WHO, 2012: 20-26). Oleh karena itu, penguatan sistem kesehatan, terutama di daerah terpencil, merupakan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi apabila pemerintah benar-benar ingin memperbaiki kondisi gizi dan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, maka MBG semestinya tidak dijadikan sebagai solusi utama, apalagi satu-satunya. Sebaliknya, MBG dapat diposisikan sebagai program sementara atau transisional, sembari pemerintah membangun kebijakan yang lebih strategis dan kapabilitatif. Pembangunan sumber daya manusia sejatinya bukan hanya tentang memberi, tetapi tentang menciptakan ruang bagi masyarakat untuk tumbuh, belajar, dan mandiri. Oleh karena itu, alih-alih mengandalkan skema pemberian makanan gratis yang sarat tantangan logistik dan rawan penyalahgunaan, negara perlu hadir dengan pendekatan yang lebih visioner, yaitu memperkuat pendidikan, memperluas demokrasi, memberdayakan ekonomi lokal, dan menjamin layanan kesehatan yang inklusif. Dengan langkah-langkah ini, kita tidak hanya menyelesaikan persoalan gizi hari ini, tetapi juga meletakkan fondasi yang kokoh bagi lahirnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan.

4. Kesimpulan

Program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, makan bergizi gratis sesungguhnya merupakan sebuah program yang baik demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Dengan intervensi pemberian makan bergizi kepada ibu hamil dan anak-anak sekolah pada usia dini, diharapkan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan makanan yang bergizi demi perkembangan intelektual mereka. Tetapi dari perspektif teori kapabilitas Amartya Sen, ditemukan dua hal penting sebagai jawaban atas pertanyaan penuntun artikel ini. *Pertama*, program MBG sama sekali tidak melibatkan masyarakat, terutama penerima program. Program ini dijadikan sebagai janji selama kampanye dan direalisasikan semata-mata karena sudah dijanjikan selama kampanye ataupun debat calon. Akibatnya, perealisasi program ini dianggap terburu-buru dan hanya melibatkan segelintir elit ekonomi dan politik yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kekuasaan. Parahnya, keterlibatan kaum oligark dalam program menciptakan relasi ketergantungan antara pemerintah sebagai patron dan masyarakat sebagai klien. Dampak lanjutannya adalah bahwa program ini sama sekali tidak memberdayakan tetapi menciptakan ketergantungan baru. *Kedua*, program MBG menutup akses atau kesempatan bagi anak didik, sekolah, dan masyarakat setempat untuk memilih dan menentukan sendiri apa yang bisa dilakukan demi pemenuhan gizi anak-anak. Anak didik ataupun ibu hamil sebagai penerima program sama sekali tidak diberi kesempatan untuk memilih menu yang cocok untuk dirinya sendiri. Mereka tidak berhak untuk menentukan apa yang baik dan berguna bagi diri mereka. Sama halnya, sekolah dan masyarakat setempat sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mengelola makan bergizi bagi anak-anak didiknya sesuai dengan potensi lokal. Intinya, lewat program MBG pemerintah sama sekali tidak memperhatikan keinginan, pilihan, atau kemampuan, entah dari anak didik penerima program ataupun dari sekolah dan masyarakat setempat.

Belajar dari program MBG ini, perlu ditegaskan bahwa setiap program pembangunan yang ditetapkan pemerintah hendaknya memperhatikan kapabilitas masyarakat melalui penguatan sistem pendidikan, perluasan partisipasi politik, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan layanan kesehatan. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan dari program tersebut. Setiap pembangunan tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga membekali masyarakat dengan sarana yang membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan dan ketergantungan. Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, pemerintah perlu berani mengalihkan fokus dari program populis yang bersifat konsumtif ke arah kebijakan strategis yang benar-benar memberdayakan rakyat. Dengan membangun pondasi yang kokoh melalui kapabilitas, Indonesia tidak hanya akan memiliki generasi yang sehat, tetapi juga cerdas, mandiri, dan mampu bersaing secara global. Masa depan bangsa tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang dibagikan hari ini, tetapi oleh seberapa kuat masyarakat dipersiapkan untuk berdiri di atas kakinya sendiri.

Daftar Pustaka:

- Afriadi, F. (2010). Child welfare programs and child nutrition: Evidence from a mandated school meal program in India. *Journal of Development Economics*, 9(2), 152–165. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2009.02.002>
- Aji, W. T. (2025). Makan Bergizi Gratis di Era Prabowo-Gibran : Solusi untuk Rakyat atau Beban Baru ? *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2), 216–226. <https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i2.134>
- Alderman, H., & Bundy, D. (2012). School Feeding Programs and Development: Are We Framing the Question Correctly? *The World Bank Research Observer*, 28(2), 205–221. <https://www.jstor.org/stable/23262830>
- Amirya, M., & Irianto, G. (2023). Sustainable Development Goals (SGDs) Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, IX(1), 187–198. <https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.38916>

- Asnuryati. (2023). Strategi Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan di Desa: Mendorong Pemberdayaan Komunitas dan Kemandirian Ekonomi Lokal. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 2175–2183. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/529/461>
- Daven, M. (2020). Gereja sebagai “Global Player” dan Solidaritas Global dengan Kaum Miskin. In M. Regus & F. Den (Eds.), *Lakukanlah Semuanya dalam Kasih Kenangan: Tahbisan Uskup Mgr Siprianus Hormat* (pp. 127–152). Obor.
- Gumelar, S., & Qomar, S. (2025). Pembangunan Berbasis Kebebasan Amartya Sen: Konsep dan Implikasi Terhadap Pembangunan Di Indonesia. *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(3). <https://jurnal.stkip-majenang.ac.id/index.php/naafi/article/view/149>
- Indarti, S. H. (2017). Pembangunan Indonesia dalam Pandangan Amartya Sen. *IJPA: The Indonesian Journal of Public Administration*, 3(1), 35–50. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i1.727>
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2025). *Badan Gizi Nasional Harus Transparan Mengelola Makan Bergizi Gratis*. IWC. <https://antikorupsi.org/id/badan-gizi-nasional-harus-transparan-mengelola-program-makan-bergizi-gratis>
- Iswahyudi, & Asnawi, N. (2024). Menuju Kebijakan Sosial Berorientasi Kapabilitas: Telaah Pemikiran Amartya Sen dan Martha Nussbaum. *Multikultura*, 3(4), 666–679. <https://doi.org/10.7454/multikultura.v3i4.1071>
- Keladu, Y. (2010). *Partisipasi Politik: Sebuah Analisis atas Etika Politik Aristoteles*. Ledalero.
- Keladu, Y. (2023). Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles. *DISKURSUS: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 19(1), 54–78. <https://journal.driyarkara.ac.id/index.php/diskursus/article/view/347>
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Laporan Nasional Survei Status Gizi Indonesia*. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/hasil-ski-2023/>
- Pramono, S. (2025). *MBG, Program atau Proyek?* TEMPO.CO (Bocor Alus). <https://youtube.com/shorts/PjXlcA9dR38?si=xv2TlsikI75BeOCr>
- Purwowidhu, C. S. (2025). *Menilik Eksistensi Program MBG atau Makan Bergizi Gratis*. Kemenku.Go.Id. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/menilik-eksistensi-program-mbg-atau-makan-bergizi-gratis>
- Putra, A. R., & Suflani. (2022). Sustainable Development Goals In Indonesia’s Post-Pandemic Economic Development. *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*, 2(3), 316–325. <https://ijbef.esc-id.org/index.php/home/article/view/78>
- Redaksi ArahJuang.com. (2025). *Indonesia Emas Rezim Prabowo-Gibran: Militarisme Gaya Oligarki!* ArahJuang.Com. <https://www.arahjuang.com/2025/03/07/indonesia-emas-rezim-prabowo-gibran-militarisme-gaya-oligarki/>
- Sanjaya, Y. C. A. (2025). *Perjalanan Makan Bergizi Gratis: Awal Mula, Berubah Nama, hingga Jadi Diberlakukan* mulai 6 Januari 2025. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/01/04/150000365/perjalanan-makan-bergizi-gratis-awal-mula-berubah-nama-hingga-jadi?page=all>
- Sen, A. (1981). *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford University Press.
- Sen, A. (1984). *Resources, Values and Development*. Harvard University Press.
- Sen, A. (1990). *Development As Freedom*. Anchor Books.
- Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. The Belknap Press of Harvard University.
- Wang, D., Shinde, S., Young, T., & Fawzi, W. W. (2021). Impacts of school feeding on educational and health outcomes of school-age children and adolescents in low- and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Global Health*, 11, 1–27. <https://doi.org/10.7189/jogh.11.04051>
- WHO. (2012). *Nutrition Landscape Information System (NLIS) Country Profile Indicators*. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/44397/9789241599955_eng.pdf